**Pengamatan Awal dari Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan, Hilal Elver, dalam misinya ke Indonesia 9-18 April 2018**

**18 April 2018**

# Pendahuluan

Anggota pers, Bapak dan Ibu sekalian

Hari ini, saya ingin berbagi beberapa pengamatan awal dari kunjungan resmi saya ke Indonesia yang dimulai pada 9 April. Saya akan menyajikan laporan akhir saya pada Maret 2019 ke Dewan Hak Asasi Manusia.

Dalam kapasitas saya sebagai Pelapor Khusus untuk hak atas pangan, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya telah melakukan kunjungan ini dengan tujuan menilai bagaimana rakyat Indonesia menikmati hak atas pangan, termasuk rekomendasi untuk praktik-praktik yang baik dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Selama kunjungan 10 hari saya, saya bertemu dengan berbagai orang Indonesia yang relevan, termasuk perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta. Saya menghadiri pertemuan yang sangat konstruktif dan bermanfaat dengan Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya juga mengikuti pertemuan yang bermanfaat dan membantu dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, anggota masyarakat sipil termasuk organisasi akar rumput, orang-orang dari sektor swasta serta para ahli yang terkait dengan lembaga internasional yang relevan.

Di tingkat provinsi, saya mengunjungi pemerintah daerah dan masyarakat sipil di Palembang, Yogyakarta, serta Ambon yang memberi saya kesempatan untuk belajar tentang praktik-praktik dan isu-isu khusus yang berkaitan dengan perbedaan wilayah. Saya melakukan kunjungan lapangan ke daerah pertanian yang dibangun di atas lahan sub-optimal di Palembang. Di Yogyakarta, saya mengunjungi sebuah desa di mana kelompok perempuan petani menerapkan program rumah pangan lestari dengan menanami tanaman pangan di halaman rumah mereka . Saya juga mengunjungi pusat pendidikan dan pelatihan perikanan serta pusat budidaya perikanan budidaya air di Ambon.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah mengundang saya untuk berkunjung dan memberi bantuan dari kantor-kantornya yang baik serta menampilkan keramahan Indonesia yang luar biasa dengan cara-cara yang membuat misi tersebut berhasil dari sudut pandang saya. Saya sangat berterima kasih atas upaya Pemerintah yang mencoba melibatkan saya dengan cara yang konstruktif dan terbuka, dan untuk berbagi pandangan dan kekhawatirannya secara apa adanya. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi keseluruhan perjalanan saya dan mengelola logistik yang membuat saya dapat bertemu dengan banyak pejabat pemerintah, penduduk, dan organisasi selama kunjungan saya. Tingkat kesiapsiagaan - substantif dan logistik - adalah demonstrasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menangani seserius mungkin dengan segala hambatan yang ada untuk merealisasikan hak atass pangan yang dilindungi secara internasional.

Saya juga berterima kasih kepada anggota Komnas Ham dan Komnas Prempuan, serta organisasi internasional dan akar rumput karena telah mengkoordinasikan beberapa pertemuan dan untuk berbagi pengalaman, keprihatinan, serta pandangan mereka dengan saya. Saya merasa sangat terkesan dengan sambutan hangat yang saya terima dan kagum dengan keberanian para aktivis yang teguh membela hak-hak azasi manusia.

Saya juga berterima kasih pada kantor Koordinator Residen PBB (UNCR) di Jakarta dan kantor OHCHR di Bangkok atas dukungannya yang luar biasa selama kunjungan saya ke Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan sektor swasta yang dengan sukarela bertemu dengan saya dan membagikan pandangannya kepada saya.

# Pengamatan awal

## Gambaran umum

Indonesia telah menikmati tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan telah memperoleh pencapaian yang mengesankan sehubungan dengan kebijakan sosial dan ekonomi. Sebagai negara berkembang yang berpenghasilan menengah, Indonesia telah memperoleh hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan, memangkas tingkat kemiskinan hingga lebih dari setengah sejak tahun 1999, menguranginya hingga 11,2% pada tahun 2015. Produksi beras meningkat 14% dan jagung 47% dari 2014- 2017. Peringkat Indonesia dalam indeks ketahanan pangan global adalah 74 pada tahun 2015, 71 pada tahun 2016, dan 69 pada tahun 2017, laju peningkatan yang stabil. Selain itu, Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi salah satu produsen beras utama dunia dengan program yang mengarah pada swasembada beras.

17.500 pulau di Indonesia menawarkan beragam potensi pertanian dan kelautan yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan ruang lautnya yang luas dan garis pantai yang panjang Indonesia telah menjadi salah satu eksportir ikan terkemuka. Berkaitan dengan sumber daya lahan, Indonesia adalah produsen utama minyak sawit dan komoditas lain seperti karet, kakao, dan kopi, serta menjadi salah satu produsen rempah-rempah terkemuka di dunia.

Saya merasa sangat gembira bahwa Pemerintah memperlakukan ketahanan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional, yang termasuk memperkuat pembangunan pedesaan dan pertanian. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mengandalkan teknologi modern, rehabilitasi sistem irigasi, pengembangan lahan rawa dan pasang surut, serta rehabilitasi hutan. ,

Komitmen Pemerintah dinyatakan oleh pengadopsian kebijakan baru dan pemberlakuan undang-undang yang sesuai, serta melalui implementasi yang energik dari kerangka hukum yang ada. Saya mengamati hukum, kebijakan, dan praktik yang baik, tetapi saya juga menyaksikan tantangan terhadap perwujudan penuh hak atas pangan bagi seluruh penduduk Indonesia.

## Kerangka Hukum dan Kebijakan

### Di tingkat internasional

Patut dipuji bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian hak asasi manusia dasar termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial ,dan Budaya (ICESCR), yang menetapkan kewajiban negara-negara dalam Pasal 11 untuk mewujudkan hak atas pangan. Sebagai pihak dalam ICESCR, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mewujudkan hak atas pangan bagi semua orang Indonesia, selain berbagai kewajiban hak asasi manusia lainnya.

Indonesia juga merupakan bagian dari beberapa perjanjian lain yang relevan dengan hak atas pangan seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penting bahwa Indonesia merupakan pihak dalam perjanjian ini karena hak atas pangan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak lain termasuk hak atas kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, air dan sanitasi, tanah dan pekerjaan, lingkungan yang sehat, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam damai berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

### Di tingkat domestik

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan tentang hak atas pangan - secara eksplisit dan implisit.

Konstitusi Indonesia secara implisit mengakui hak atas pangan dan gizi - dalam konteks penegasan hak atas kehidupan dan penghidupan, kehidupan yang bermartabat, lingkungan yang sehat, jaminan sosial dan pekerjaan.

Referensi eksplisit tentang hak atas pangan ditemukan dalam Undang-undang tentang Pangan (no. 18/2012) dan Undang-Undang tentang Tanaman Pangan dan Pertanian Lestari (no. 41/2009). Undang-undang tentang Pangan ini, khususnya, meminta Pemerintah bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan pokok dan makanan lain sesuai dengan kebutuhan orang miskin, serta orang-orang yang rentan terhadap kelangkaan pangan dan kekurangan gizi dan mereka yang dihadapkan pada situasi darurat (Pasal 59. (1)). Undang-undang ini, juga, mendorong keragaman pangan lokal dan pola konsumsi makanan yang aman dan seimbang.

Ada juga undang-undang yang terkait erat dengan hak atas pangan seperti undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (no. 41/2009), Undang-undang Kehutanan (no. 41/1999), undang-undang tentang Pengelolaan Pulau Pesisir dan Pulau Kecil, undang-undang tentang Perikanan serta undang-undang tentang Prinsip-prinsip Agraria (no. 5/1960), undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (no. 19/2013) dan undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petani Nelayan, dan Petani Garam (no. 7/2016).

Pemerintah telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan khusus yang ditujukan untuk mempromosikan ketahanan pangan dan gizi seperti resolusi Pemerintah 17/2015, Keputusan Presiden 83/2017 serta berbagai peraturan menteri.

Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang baik untuk isu-isu yang berkaitan dengan pangan dan sedang dalam proses penyusunan undang-undang tentang produksi minyak sawit dan hak masyarakat adat yang seharusnya menghasilkan perbaikan lebih lanjut.

## Isi normatif tentang hak atas pangan

Isi normatif hak atas pangan meliputi ketersediaan, aksesibilitas, kecukupan kuantitas dan kualitas, serta kelestarian.

### Ketersediaan

Ketersediaan mengacu pada kemungkinan-kemungkinan baik untuk memberi makan sendiri atau memiliki sistem distribusi, pemrosesan dan pasar yang berfungsi dengan baik dan komprehensif untuk menanggapi tuntutan dari orang-orang yang memiliki situasi yang berbeda serta bagi orang yang membutuhkan. Ini mencakup bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas makanan, yang berhubungan dengan masalah gizi dan menghormati pola makan tradisional.

Indonesia berprestasi baik dalam hal peningkatan produksi, terutama makanan pokok seperti beras dan jagung, dengan mengikuti pertumbuhan populasi serta meningkatnya permintaan akibat meningkatnya standar hidup. Populasi telah tumbuh dari 205 juta pada tahun 1998 menjadi 262 juta pada tahun 2017, dan diperkirakan akan mencapai 305 juta pada 2035. Kebijakan dan program pangan Pemerintah harus dikembangkan dan diimplementasikan dengan cara yang memperhitungkan kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah dengan ekspektasi konsumsi yang meningkat.

Pemerintah telah dan sedang memperoleh kemajuan yang baik dalam hal produksi pangan, tetapi diperlukan diversifikasi kebijakan untuk membatasi fokus pada beras –yang tentu saja merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Kebijakan yang dikembangkan untuk mengurangi kerawanan pangan tampaknya terlalu terfokus pada beras seperti di Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE). Mengingat bahwa tidak semua penduduk ingin menjadikan beras sebagai makanan utama mereka, kebijakan Pemerintah dalam produksi makanan pokok harus lebih menyadari bahwa ada beragam kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan berbagai tradisi makanan.

Ketersediaan makanan harus memenuhi kebutuhan pola makan serta peka terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya yang bertumpu pada penerimaan relatif berbagai makanan. Pemerintah telah menanggapi kebutuhan populasi terhadap pangan dengan mempromosikan pertanian dan dengan memberikan subsidi jika diperlukan. Namun, saya memperhatikan bahwa kebijakan dan praktik resmi tidak selalu peka terhadap sikap budaya yang berkaitan dengan makanan, sehingga menghasilkan ada wilayah-wilayah yang tidak puas. Misalnya, beras dan mie instan telah didistribusikan kepada masyarakat yang telah terbiasa mengandalkan berbagai jenis bahan pokok berbeda seperti misalnya sagu.

Makanan bukan hanya kuantitas yang akan mencegah orang menjadi lapar. Terutama di negara yang kaya budaya seperti orang Indonesia dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan kaya, makanan menginformasikan identitas manusia; makanan mendefinisikan jati diri seseorang. Pada saat yang sama, makanan dapat mengambil atau mengorbankan identitas orang dan mendistorsi memori historisnya. Dalam hal ini, kebijakan dan praktik pangan Pemerintah harus melakukan upaya maksimal untuk mempertimbangkan penerimaan budaya pangan.

### Aksesibilitas

Agar hak atas pangan dapat dipenuhi, dibutuhkan akses fisik dan ekonomi. Aksesibilitas fisik berarti bahwa makanan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak, orang tua atau orang cacat, serta orang-orang yang tinggal di tempat terpencil.

Akses ekonomi berarti bahwa makanan harus terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya seperti biaya pendidikan, layanan medis, atau perumahan. Namun, harga makanan terus meningkat sehingga banyak orang Indonesia tidak selalu dapat menikmati makanan bergizi seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum. Ini terutama berlaku untuk kaum miskin di perkotaan, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan petani subsisten. Menurut Program Pangan Dunia, sepertiga penduduk di Indonesia tidak mampu membeli makanan seimbang yang memenuhi kebutuhan gizi minimum. Harga pangan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gizi buruk di Indonesia.

### Kecukupan: Gizi Buruk

Meskipun ekonomi dan produktivitas pangan beberapa tahun terakhir meningkat, lebih dari 80 juta orang Indonesia tetap rentan terhadap kerawanan pangan. Indonesia menderita beberapa dimensi gizi buruk: kurus, yang, mengakibatkan anak-anak sakit dan mengalami stunting, kekurangan gizi mikro, serta dalam beberapa tahun terakhir, kelebihan berat badan/obesitas.

Indonesia berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi makanan pokok yang berlebihan serta tidak cukup buah dan sayuran. Menurut Bank Dunia, 92% populasi di Indonesia mengkonsumsi jauh lebih sedikit daripada tingkat rekomendasi WHO untuk buah dan sayuran. Upaya Pemerintah mempromosikan konsumsi yang sehat dan seimbang harus diperkuat melalui program sekolah, edukasi, dan juga dengan melakukan upaya sebanyak mungkin untuk membuat orang-orang, terutama orang miskin, dapat memperoleh akses ke makanan sehat dengan harga terjangkau dan di lokasi yang mudah dijangkau.

Berkenaan dengan kekurangan gizi, sekitar 9 juta anak di Indonesia di bawah lima tahun mengalami stunting. Pada tahun 2015, hampir 30% anak Indonesia mengalami stunting. Gizi buruk pada ibu hamil juga merupakan masalah serius terutama untuk perempuan menyusui. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatasi masalah ini tetapi upaya ini perlu diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di seluruh negeri dengan tujuan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan.

Gizi buruk dan kerentanan makanan memengaruhi daerah-daerah tertentu lebih parah daripada yang lain,

dan memengaruhi populasi tertentu lebih dari yang lain. Anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil, masyarakat adat, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan daerah terpencil khususnya sangat rentan akan masalah ini.

Ibu dan Bapak sekalian,

Sekarang, saya ingin menarik perhatian Anda pada sebuah insiden yang sangat tragis.

Selama beberapa bulan terakhir, 72 anak telah meninggal di kabupaten Asmat di Papua: 66 anak meninggal akibat campak dan 6 anak sebagai akibat langsung dari gizi buruk. Kematian mereka disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah kerawanan pangan yang kronis dan kurangnya akses pada layanan kesehatan yang layak. Kematian mereka dapat dicegah, tetapi hal itu dibiarkan terjadi.

Sebagai seorang ibu, saya bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakit dan duka yang tak terperi yang dirasakan para ibu dan ayah - melihat anak-anak mereka meninggal karena penyebab yang dapat dicegah dan tidak dapat memberikan mereka perawatan medis yang baik.

Belasungkawa saya yang terdalam bagi keluarga dan masyarakat di Asmat yang kehilangan anak-anak.

Sayangnya, saya tidak dapat pergi ke Papua pada kunjungan ini karena waktu saya yang sangat terbatas di negara ini, tetapi untungnya sejumlah besar perwakilan mereka datang untuk berbicara dengan saya.

Saya ingat dengan jelas jeritan seorang bidan dari Papua: “Saya tidak bisa membiarkan anak-anak mati lagi; kita jangan membiarkan itu terjadi lagi. Saya tidak ingin memberi makan bagi orang-orang dan anak-anak saya makanan yang tidak kami inginkan. ”

Saya juga ingat rasa frustasinya. Beberapa orang bertanya, “Mengapa? Mengapa ini terus menerus terjadi kepada kita? Kami juga orang Indonesia. Kami ingin diperlakukan seperti orang Indonesia yang lain.”

Menurut saya penderitaan ini mengungkapkan tuntuntan yang sangat wajar.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban, yang diakui Pemerintah untuk menjamin hak atas pangan bagi semua penduduknya di Indonesia tanpa memandang asal, suku, agama, jenis kelamin, atau usia mereka. Tantangannya adalah untuk mengimplementasikan kewajiban mendasar ini dengan mengadopsi kebijakan yang efektif.

Saya memahami bahwa Pemerintah, terutama Presiden, telah membuat peningkatan mata pencaharian masyarakat di Papua sebagai prioritas utama yang berfokus pada jaminan ketahanan pangan dan mengatasi masalah gizi buruk. Saya sangat menyambut baik keinginan Pemerintah untuk bekerja sama dengan sistem hak asasi manusia PBB mengenai tantangan yang diakibatkan oleh situasi di Papua. Sikap yang terbuka ini diungkapkan dengan mengundang kolega saya, Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan ke Papua tahun lalu dan menyampaikan undangan serupa kepada tim Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Saya sangat senang mengetahui komitmen Pemerintah, dan dengan tegas menyerukan kepada Pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi seperti itu agar tidak terjadi lagi di Papua atau di mana pun di Indonesia.

Dalam pelaksanaan komitmennya, Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi krisis pangan dan kesehatan di Papua tetapi sekaligus mengatasi akar penyebab kerawanan pangan, termasuk kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sambil meningkatkan perlindungan sosial, pendidikan dan mata pencaharian umum penduduk.

Gizi buruk tidak hanya bergantung pada konsumsi makanan tetapi juga tergantung pada layanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, air minum bersih, dan sanitasi. Dalam hal ini, Pemerintah harus mengambil pendekatan holistik dalam perwujudan hak atas pangan, terutama dalam menanggapi kondisi darurat di mana Papua adalah contoh luar biasa saat ini.

# Tantangan untuk merealisasikan hak atas pangan

Saya telah mengamati sejumlah masalah yang memengaruhi hak orang atas makanan.

## Kepemilikan/penguasaan Lahan

Ketersediaan dan aksesibilitas makanan terkait erat dengan hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya untuk produksi pangan.

Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil. Sekitar 25 juta keluarga petani adalah petani kecil yang memiliki kurang dari 0,5 hektar lahan yang tidak cukup untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.. Pemerintah sedang bekerja mendistribusikan lahan bagi petani sehingga setiap keluarga petani dapat memiliki minimal 2 ha. Saya menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia ini dalam menyediakan lahan yang cukup bagi petani untuk memfasilitasi perwujudan hak atas pangan. Saya memahami bahwa implementasi penuh dari proyek ini mengalami penundaan karena kurangnya sumber daya dan masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya akan sangat mendorong Pemerintah untuk melanjutkan upaya ini agar dapat menyelesaikan proyek secara tepat waktu.

Dengan mempertimbangkan disparitas yang besar dalam kepemilikan lahan antara laki-laki dan perempuan, Pemerintah harus mempertimbangkan perspektif gender ketika mendistribusikan tanah dengan tujuan mencapai kesetaraan yang berkenaan dengan laki-laki dan perempuan. Meskipun menegaskan kesetaraan gender dalam sistem hukum, adat istiadat dan tradisi terus memblokir akses perempuan terhadap kepemilikan dan penguasaan lahan. Ini menghambat akses perempuan ke sumber daya terkait seperti program kredit dan penyuluhan

Saya senang mengetahui adanya pengakuan resmi atas tanah adat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah telah mengumumkan bahwa Pemerintah akan mengembalikan 13.000 ha lahan adat ke sembilan masyarakat adat. Mengingat bahwa banyak masyarakat adat bergantung pada lahan dan hutan sebagai sumber utama makanan dan mata pencaharian mereka, mengakui kepemilikan mereka dan memberikan kembali tanah leluhur kepada mereka merupakan langkah penting menuju pemenuhan hak mereka atas pangan.

Masalah lain yang menantang adalah akuisisi lahan dalam skala besar. Hal ini telah menjadi perhatian saya sebagai salah satu rintangan paling penting yang menghalangi terwujudnya hak atas pangan di Indonesia. Dengan sistem kepemilikan dan pengklasifikasian tanah yang tidak jelas di registrasi Pemerintah, banyak bisnis termasuk penebangan kayu, kelapa sawit, dan perusahaan pertambangan dilaporkan telah diberikan izin untuk beroperasi di lahan tempat orang telah bertani selama beberapa generasi. Realokasi tanah seperti itu sering dilakukan tanpa konsultasi, dan tanpa menerapkan prosedur informed consent (persetujuan setelah diberi informasi) sebelumnya dengan penduduk yang terkena dampak, tanpa kompensasi yang memadai, dan tanpa menyediakan alternatif yang manusiawi.

Orang-orang diusir paksa dari tanah mereka dan sering dikenakan tuntutan pidana ketika mereka mencoba untuk mengklaim kembali tanah, yang seringkali merupakan mata pencaharian tunggal mereka. Dikatakan bahwa ada lebih dari 230 pemimpin adat dan aktivis yang saat ini sedang diadili atas masalah tanah dan enam suku menghadapi situasi hampir punah sebagai akibat dari perampasan tanah. Saya sangat prihatin dengan kriminalisasi petani, anggota masyarakat, dan aktivis atas masalah tanah yang diperebutkan. Pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menghindari agar masalah lahan tidak semakin meruncing dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petani yang berusaha mempertahankan atau merebut kembali tanah mereka tidak boleh dikriminalisasi ketika tindakan mereka tersebut merupakan upaya untuk memperoleh hak-hak mereka dengan sewajarnya.

Beberapa masalah konflik lahan menjadi perhatian saya selama kunjungan kali ini. Saya pernah mendengar seorang perempuan dari Pulau Pari hampir menangis ketika dia berseru: “Kami tak pernah menjual tanah kami. Kami tidak pernah menjual tanah kami,” seorang petani setempat dari Sumatera Selatan berbagi tahun-tahun perjuangannya yang belum selesai mengambil kembali tanahnya melawan perusahaan tebu besar. Saya sangat tersentuh oleh keberanian dan ketekunan mereka dalam pergumulan mereka memperjuangkan hak mereka terhadap kepentingan perusahaan yang kuat. Pemerintah harus mendengarkan para korban konflik lahan dan mencoba menyelesaikan semua konflik secara memadai dan tepat waktu.

## Perikanan dan masyarakat nelayan

Perikanan dan masyarakat daerah pesisir juga menghadapi beberapa tantangan untuk memperoleh pangan dan melestarikan mata pencahariannya. Saat ini, mereka semakin kehilangan akses pesisir dan daerah penangkapan ikan akibat adanya pembangunan infrastruktur, pariwisata, pencemaran lingkungan, kepunahan atau kegiatan yang membahayakan ikan akibat penangkapan ikan ilegal, serta peristiwa cuaca ekstrem. Kepentingan penangkapan ikan ini dipaksa untuk melaut lebih jauh untuk menangkap ikan yang membuat mereka mengalami risiko lebih besar karena peralatan yang buruk; karena mereka tidak bisa memancing di perairan yang akrab, dan mengalami pengurangan besar pada tangkapan mereka. Saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah karena menerapkan kebijakan dan praktik-praktik pengawasan yang ketat untuk menghentikan kapal penangkap ikan asing ilegal memasuki wilayah perairan Indonesia.

Pada saat yang sama, sudah ada masyarakat miskin yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta yang terkena dampak parah akibat Proyek Reklamasi 17 Pulau. Proyek ini ditahan untuk sementara tetapi reklamasi yang telah dilakukan telah menciptakan pengurangan 80% dalam jumlah ikan yang mereka tangkap yang memiliki dampak sangat merugikan pada hak mereka atas pangan dan mata pencaharian. Saya telah menyaksikan kehidupan sederhana yang dijalani oleh keluarga nelayan di Teluk Jakarta, namun mereka bertekad untuk mempertahankan kehidupan mereka di mana pun mereka berada. Mengambil sumber mata pencaharian mereka akan mendorong mereka ke jurang kemiskinan yang ekstrem. Banyak dari anggota komunitas ini telah direlokasi empat kali - bayangkan bagaimana rasanya jika Anda dibawa keluar dari seluruh kehidupan dan pekerjaan yang Anda kenal dan dipindahkan ke suatu tempat baru untuk melanjutkan hidup - dan itu telah terjadi empat kali.

Saya ingat anggota masyarakat - termasuk nelayan laki-laki dan perempuan serta anak-anak mereka - di atas perahu kecil dengan bendera yang memproklamasikan hak mereka, menyeberangi laut dengan mal dan gedung pencakar langit mewah di belakang mereka menciptakan rasa perpecahan sosial dan ekonomi yang mendalam. Namun apa yang saya lihat dan ingat adalah tekad mereka untuk menegakkan martabat dan kebanggaan mereka - serta melakukannya dengan cara yang lebih tinggi daripada gedung pencakar langit.

Yang mereka inginkan hanyalah menjalani hidup yang mereka kenal seperti sebelum reklamasi mengubah kehidupan mereka.

Untuk setiap konsesi di darat atau di air, Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena dampak dihormati sepenuhnya - mereka yang terkena dampak harus diberi tahu secara memadai tentang dampak yang diantisipasi secara tepat waktu, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan diberikan pemulihan yang memadai jika terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka.

Pembangunan adalah target penting bagi setiap negara termasuk, tentu saja Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia termasuk hak atas pangan, serta hak untuk memiliki lingkungan yang sehat, dan akses ke air minum bersih untuk mempertahankan hak hidup. Ini bukan hanya hal moral yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan kewajiban hukum pemerintah dan satu cara yang sangat baik untuk menjaga proyek-proyek pembangunan mereka efektif dan berkelanjutan pada tingkat praktis. Populasi yang sehat dan puas adalah sumber daya yang sangat berharga, namun sering diabaikan, dalam proses pembangunan.

## Praktik bisnis

Kegiatan bisnis terutama bisnis yang berkaitan dengan kelapa sawit, pertambangan, dan perkebunan lainnya memiliki dampak yang besar terhadap hak atas pangan. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan menghasilkan 35 juta ton minyak sawit per tahun. Kelapa sawit tampaknya menjadi bisnis yang menggiurkan tetapi sayangnya bisnis itu datang dengan mengorbankan sejumlah hal - mengorbankan atas hak asasi manusia, dan lingkungan. Ekspansi industri perkebunan kelapa sawit selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan berbagai masalah terkait hak atas pangan seperti penggundulan hutan, degradasi tanah, konflik, dan kondisi kerja bagi pekerja perkebunan termasuk jam kerja yang panjang dan penanganan pupuk beracun terutama bagi perempuan.

Di tengah kekhawatiran yang berkembang, Pemerintah telah mengumumkan penundaan sementara pemberian izin baru untuk industri kelapa sawit, yang saya sambut dengan hangat. Saya menyarankan agar Pemerintah mengambil kesempatan ini untuk meninjau kebijakan dan praktik yang ada terkait dengan bisnis minyak sawit dan memastikan praktik bisnis sejalan dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional termasuk Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Saya juga ingin mendorong agar Pemerintah meningkatkan transparansi dan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kelapa sawit termasuk usulan RUU tentang minyak sawit oleh Parlemen.

Penambangan menimbulkan masalah hak asasi manusia yang serupa dengan bisnis kelapa sawit. Dampaknya pada lingkungan seperti pencemaran tanah dan air telah mengakibatkan berkurangnya produksi pangan dan pendapatan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan untuk penghidupan mereka. Ada banyak konflik mengenai konsesi penambangan - beberapa sudah diselesaikan tetapi banyak yang masih berlangsung.

Penambangan dan proyek infrastruktur besar lainnya membutuhkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan izin. Dalam hal ini, perlu untuk melakukan AMDAL yang lebih transparan dan partisipatif untuk mencegah masalah timbul di kemudian hari.

Penduduk yang terkena dampak harus memiliki akses ke pemulihan ketika hak mereka dilanggar oleh bisnis dan mereka yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab.

## Proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Ini menghadapi tandatangan dengan jumlah yang sangat besar dan berbagai masalah aksesibilitas fisik. Ada daerah terpencil yang sulit dijangkau sehingga sulit bagi orang untuk mengakses makanan dan layanan sosial dasar atau bagi Pemerintah untuk memperbaiki situasi. Untuk menyelesaikan masalah aksesibilitas, Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh negeri termasuk meningkatkan akses ke pulau dan wilayah terpencil. Saya yakin ini adalah upaya yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses fisik terhadap pangan, tetapi pada saat yang sama, saya ingin menegaskan kembali bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur ini seharusnya menjaga kebutuhan dan nilai-nilai dari penduduk yang terkena dampak pada inti dari perencanaan kebijakan; langkah-langkah harus diambil dengan cara yang melayani hak-hak dari penduduk bukan secara tidak kritis melayani kepentingan bisnis. Ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan regional dalam standar hidup. Yang paling penting, proyek infrastruktur tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak mereka atas tanah, pangan, dan mata pencaharian. Saya khawatir bahwa dalam beberapa kasus, tanah diambil dari orang-orang untuk proyek pembangunan infrastruktur tanpa adanya konsultasi yang layak, kompensasi yang memadai, dan perencanaan yang matang untuk memastikan alternatif yang manusiawi.

## Masalah lingkungan dan perubahan iklim

Hak atas pangan terkait erat dengan masalah lingkungan, karena produksi pertanian tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan ekosistem yang sehat. Ini sangat penting bagi Indonesia, karena negara ini memiliki posisi lingkungan yang unik, dan keanekaragaman hayati yang kaya.

Saya sangat prihatin tentang penggunaan berlebihan bahan kimia dalam pertanian yang dapat menyebabkan erosi tanah, serta polusi air ketika dilepas ke air. Praktik pertanian intensif memiliki dampak buruk yang serius terhadap lingkungan. Pertanian berkelanjutan, terutama praktik agro-ekologi harus dikampanyekan dan diberikan insentif oleh pemerintah untuk petani kecil.

Indonesia masih memiliki 76% kawasan hutan tetapi rentan terhadap laju penggundulan hutan yang cepat selama dekade terakhir. Hutan adalah rumah bagi beragam fauna, flora, dan manusia. Ekosistem yang sehat sangat penting dalam penikmatan hak atas pangan karena manusia, terutama petani subsisten bergantung pada ekosistem untuk memperoleh makanan dan mata pencaharian mereka.

Indonesia memiliki 81.000 kilometer garis pantai dan rentan terhadap naiknya permukaan laut, erosi pantai. Peristiwa cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim telah memengaruhi negara yang mengambil nyawa manusia dan merusak mata pencaharian mereka termasuk produksi pangan. Misalnya, kekeringan el Niño yang berkepanjangan di tahun 2015 dan 2016, menggangu pertanian, meningkatkan penyakit, dan mengurangi produksi tanaman. Perubahan iklim dapat memiliki efek yang lebih merusak pada hak asasi manusia terutama hak atas pangan jika tindakan yang tepat tidak diambil termasuk mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian kebijakan-kebijakan ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak melanggar mata pencaharian masyarakat.

# Rekomendasi awal

Saya akan menyampaikan analisis hak asasi manusia yang terperinci tentang situasi pangan di Indonesia dan membuat rekomendasi konkret kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan dalam laporan saya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2019. Sementara itu, saya ingin membuat beberapa rekomendasi awal kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan kunjungan 10 hari saya.

Pertama, Pemerintah harus meningkatkan tingkat koordinasi di antara kementerian terkait yang menangani masalah pangan. Selama kunjungan saya, saya perhatikan bahwa kementerian bekerja secara sendiri-sendiri - sering tidak mengetahui apa yang dilakukan masing-masing kementerian yang lain. Kurangnya koordinasi mengganggu keselarasan kebijakan dan menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi juga sangat penting karena banyak kebijakan yang relevan dengan pangan memerlukan koordinasi dan kerja sama dari kedua level tersebut.

Kedua, Pemerintah harus mengambil tindakan segera untuk mengurangi gizi buruk. Pemerintah juga harus memberantas akar penyebab kelaparan dan kekurangan gizi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya layanan kesejahteraan sosial.

Ketiga, kebijakan pangan harus didiversifikasi. Kebijakan pangan yang berfokus pada swasembada beras saat ini tidak akan memberikan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan gizi serta praktik pertanian berkelanjutan.

Keempat, Pemerintah harus melakukan upaya lebih lanjut dalam mengimplementasikan berbagai undang-undang terkait hak atas pangan. Seperti disebutkan, Indonesia memiliki hukum dan kebijakan yang relatif baik yang kondusif untuk merealisasikan hak atas pangan. Tidak semuanya diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu. Lebih banyak yang harus dilakukan dalam hal ini.

Kelima, Pemerintah harus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani dan nelayan dengan memberikan mereka penguasaan lahan pertanian dan perikanan yang stabil serta layanan sosial. Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan yang terlibat dalam pertanian dan perikanan serta memastikan bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya.

Keenam, Pemerintah harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penguasaan tanah. Pemerintah harus mempercepat pelaksanaan distribusi lahan kepada petani dan menyelesaikan semua konflik terkait lahan. Pemerintah seharusnya tidak mengkriminalisasi petani, anggota masyarakat, aktivis yang memperjuangkan masalah lahan tetapi memberi mereka konsultasi dan mediasi.

Ketujuh, Pemerintah harus memastikan kegiatan bisnis terutama perkebunan besar, kelapa sawit dan kegiatan penambangan sejalan dengan hukum dan prinsip hak asasi manusia internasional. Bisnis juga harus memastikan bahwa praktik-praktik kerja mereka menghormati hak asasi manusia sesuai dengan tanggung jawab mereka yang terkandung dalam Prinsip Panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia.